

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH (SAKD),
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

AS SYIFA NURILLAH
NIM. 12030110141021

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : As Syifa Nurillah

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141021

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)**

Dosen Pembimbing : Dul Muid, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 4 Maret 2014

Dosen Pembimbing,



(Dul Muid, S.E., M.Si., Akt)

NIP. 196505131994031002

PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

Nama Penyusun : As Syifa Nurillah

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141021

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)**

Dosen Pembimbing : Dul Muid, S.E., M.Si., Akt

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Maret 2014

Tim Penguji

1. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt

2. Adityawarman, S.E., M. Acc., Ak

3. Dr. Hj. Zulaikha, M. Si., Akt

(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, As Syifa Nurillah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,



(As Syifa Nurillah)
NIM 12030110141021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (QS. Muhammad : 7)

“Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu, tidaklah akan menimpamu. Dan apa yang ditetapkan akan menimpamu, tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, dan kemudahan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan” (HR. Tirmidzi)

Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Swt, Tuhan seluruh alam (Qs. Al An'am : 162)

Skripsi ini ku persembahkan untuk

Orangtuaku tercinta sebagai baktiku. Adik-adikku tersayang.

Saudara-saudara seperjuanganku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.

Sahabat-sahabatku yang telah menemani, mewarnai dan menginspirasi hidupku.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the factors that affect the quality of local government financial reports . The factors studied were the effects of Human Resources competencies , the application of Financial Accounting System , the utilization of information technology , and Internal Control System .

Collecting data this research used a questionnaire survey. The questionnaire was delivered to 100 employees working units (SKPD) Depok city in financial/ accounting division, total of 64 questionnaires (64 %) returned complete and can be processed . The data collected were processed using SPSS version 21.0. The statistical methods used to test the hypotheses is multiple linear regression analysis.

The results of hypothesis testing is human resource competency, Local Financial Accounting System implementation, utilization of information technology, and systems of internal control the government has a significant positive effect on the quality of local government financial reports.

Keywords : quality of financial reporting , human resource competency, financial accounting systems, information technology, internal control system.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti adalah pengaruh kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, pemanfaatan Teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 100 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan, sebanyak 64 kuesioner (64%) kembali diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 21.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi, sistem pengendalian intern

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Marsono, S.E, M.Adv, Acc, Akt. sebagai dosen wali yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph. D sebagai dosen pembina mizan yang telah memberikan banyak arahan, motivasi dan nasehat kepada penulis.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP atas semua ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak terputus.
7. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP yang membantu kelancaran mahasiswa dalam urusan administrasi akademik.
8. Badan Kesbangpol dan Linmas Jawa Tengah dan Kota Depok yang telah memberikan izin penelitian.
9. Bapak Nurmahmudi Ismail selaku Walikota Kota Depok yang telah memberikan banyak informasi dan membantu dalam penelitian ini.
10. Pegawai di SKPD Kota Depok yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam pemerolehan data penelitian ini.
11. Orang tua tercinta atas didikan, bimbingan, dan pengorbanan yang luar biasa serta doa yang tiada henti untuk penulis
12. Saudara-saudaraku tersayang Afiyah, Arina, Abdan, semoga kita bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua.
13. Mba Hani, Bu Wulan, Bu Iis, Bu Anggoro yang telah memberikan bimbingan keagamaan selama ini.
14. Igha, Nisa, Rizal, Anwar, Ashim, Maul, dan teman-teman ikhwah 2010 yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Jazakumullah khoir telah menjadi partner dalam mensyiarkan Islam selama ini. Kalian telah mengisi lembar indah dalam hidupku. Lanjutkan perjuangan, Keep Istiqomah ya..

15. Pengurus BPMAI FEB UNDIP periode 2013: Aris, Dian, Bulhan, Hantoro, Intan, Lukman, Dewi M, Haikal, Nela, Dewi O, Utie, dan Roy. Jazakumullah atas kebersamaannya yang selalu menginspirasi. Tetap semangat menjalankan amanah-amanah selanjutnya..
16. Mba Sinta, Ka Ummu, Mba Ayu, Mba Noni, Mba Wulan, Mba Nibras, Mas Fiyyan, Mas Najib, Mas Addin, Mas Eko, Mas Fery, Mba Firda dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas saran dan masukannya selama ini..
17. Keluarga Besar MIZAN FEB UNDIP (BPMAI, Peduli Dhuafa, KSEI, ZIS Center) atas perjalanan yang indah ini. Di sini, aku menemukan arti indahnya ukhuwah dan dakwah bersama kalian..
18. Keluarga besar INSANI Undip 2014 : Rizal, Ali, Agung, Arif, Irfan, Aji, Ricky, , Wahid, Muadz, Aya, Lia, Hasna, Rhea, Dwi, Rina, Hanik, dan Ela, serta yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu. Maaf ya tidak bisa banyak membantu, Keep Spirit!
19. Keluarga besar KAMMI komisariat Ekonomika dan Bisnis, tetap solid, kritis, dan semangat menghasilkan karya.
20. Adik-adik yang sangat aku sayangi dan aku banggakan : Anisa, Ayu, Dien, Elvira, Dewa, Dina, Ros, Erviana, Rina, Oshin, Nonik, Rara, Tia, Citra, Topan, Roy, Anam, Bagas, Aul, Zulfa, Dea, Yunita, Gustin, Lutvia, Dina, serta yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Kalian menjadi motivasi yang luar biasa buatku. Terima kasih banyak untuk semuanya dan teruslah berkarya.

21. Teman-teman dan adik-adik di ISLAH Semarang. Terima kasih telah menjadi tempat melepas lara setiap kepenatan yang ada, tetapi setelah bertemu kalian pasti semangatku menjadi luar biasa kembali. Teruskan perjuangan, jalan masih panjang ☺.
22. Seluruh penghuni wisma dari 2010-2014, penghuni Nayla Farafisha, Nasywa Kamil part 1 and 2, dan Granada (Mba Isti, Lia, Melia, Shofwa, Dewi, Syafa, Rizki, Kirana, Eka, Qotrun, Yumna, Verina, dan Ovin). Terima kasih atas suka duka dan canda tawanya, juga nemenin begadang untuk menyelesaikan skripsi ini..
23. Seluruh Akhwat FEB UNDIP atas canda tawa dan ukhuwahnya, semoga Allah menjaga ukhuwah di antara kita hingga akhir hayat.
24. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2010 yang selama 4 tahun belajar bersama, khususnya untuk aisyah, semoga kita menemukan jalan kesuksesan kita masing-masing.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang membantu kelancaran penelitian ini, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.
26. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 4 Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1.3.1. Tujuan Penelitian	18
1.3.2. Kegunaan Penelitian	19
1.4. Sistematika Penulisan	20
BAB II TELAAH PUSTAKA	21
2.1. Landasan Teori.....	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32
2.3. Kerangka Pemikiran.....	34
2.4. Pengembangan Hipotesis	36
2.4.1. Hubungan Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.....	36
2.4.2. Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan	37
2.4.3. Hubungan Pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan	40
2.4.4. Hubungan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43

3.1.1. Variabel Penelitian.....	43
3.1.2. Definisi Operasional	44
3.2. Populasi dan Sampel	48
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	49
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	50
3.4. Metode Analisis Data.....	50
3.5.1. Uji Kompetensi Data.....	50
3.5.2. Analisis Statistik Deskriptif	52
3.5.3. Uji Asumsi Klasik.....	52
3.5.4. Uji Regresi Linier Berganda	54
3.5.5. Uji Goodness of Fit.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	56
4.2. Analisis Data.....	59
4.2.1. Deskripsi Variabel.....	59
4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data	61
4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik	64
4.2.4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
4.2.5. Hasil Uji Goodness	72
4.3. Interpretasi Hasil.....	76
4.3.1. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan	76
4.3.2. Pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan.....	77
4.3.3. Pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan.....	78
4.3.4. Pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan.....	79
BAB V PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Rekomendasi atau Implikasi Kebijakan	83
5.3. Keterbatasan	83
5.4. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kelompok Temuan SPI dalam pemeriksaan keuangan.....	13
Tabel 1.2 Kelompok Temuan akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU atas pemeriksaan LKPD th. 2011	14
Tabel 1.3 Perkembangan opini LKPD th. 2007-2011.....	15
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok.....	57
Tabel 4.2 Daftar Kuesioner	58
Tabel 4.3 Profil Responden.....	58
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel	59
Tabel 4.5 Kategori Skor Variabel	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Data	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Data	64
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Determinasi.....	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistika t	74
Tabel 4.14 Hasil Uji Hipotesis	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas – Histogram.....	65
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas – Probabilitas Plots	65
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	69

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Depok. Rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, manfaat, dan tujuan penelitian serta sistematika penelitian juga diuraikan dalam bab ini. Berikut penjelasan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penelitian.

I.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004). Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD

dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan

keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang *et al.* (1999) dalam Xu *et al.* (2003) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu (*timeliness*).

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

a. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

b. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria

kompetensi informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan? Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami?

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di-*download* dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Seperti tulisan yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anwar Nasution menilai laporan keuangan Pemerintah Daerah banyak yang bermasalah bahkan tidak layak audit. Anwar Nasution menyebutkan, permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah dengan boros yang tidak jelas keperluannya. Anwar Nasution juga mengkritik akuntabilitas transparansi laporan keuangan Pemda masih sangat rendah (indosiar.com, 10 Januari 2007).

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Menurut Devi, laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

DEPOK – DPPKA Utamakan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Isu Strategisnya Dalam Forum OPD 2013. Pembahasan materi I dipresentasikan pula oleh Kepala DPPKA yang menjabarkan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA Kota Depok, Struktur Organisasi, Visi Misi DPPKA, Tiga Program Andalan yang dilaksanakan oleh DPPKA serta 3 isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi DPPKA, yaitu antara lain : Kualitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah. Tiga isu strategis inipun kemudian juga dijabarkan dalam bentuk table yang berisi sasaran, strategi dan arah kebijakan, indicator sasaran, target di tahun 2014 serta tantangan/ kendala dan solusi untuk mencapai targetnya.

Selanjutnya Kepala DPPKA juga menjabarkan tentang arah kebijakan yang akan di laksanakan di tahun 2014, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, perencanaan penganggaran , serta pengelolaan keuangan dan asset.
2. Mengembangkan pelayanan secara transparan dan terstandarisasi, dll.

(<http://dppka.depok.go.id/?m=201302>)

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah membuat program/ kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan *singl entry menjadi dauble entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double enrty* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable (Mardiasmo: 2006).

Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu :

1. Pengembangan sistem pembukuan berganda (Double Entry), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.

2. Penggunaan basis akrual (Accrual Basis) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan.

Hal lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran

data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. keandalan Laporan Keuangan;
- c. pengamanan aset negara; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 520 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2012 menemukan 1.427 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	642
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	469
3.	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	316
	Jumlah	1.427

(Sumber : www.bpk.go.id – IHPS II Tahun 2012)

BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.871 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak 1,17 triliun sebagaimana disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2011

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp)
1	Kerugian Daerah	578	390.331,70
2	Potensi Kerugian Daerah	103	295.701,83
3	Kekurangan Penerimaan	299	131.932,13
Sub Total 1		980	817.965,66
4	Administrasi	693	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	85	58.397,28
6	Ketidakefektifan	113	295.561,65
Sub Total 2		891	353.958,93
Jumlah		1.871	1.171.924,59

Sumber : BPK RI

BPK juga telah melakukan audit atas LKPD selama lima tahun, dari tahun 2007-2011. BPK memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana tersaji dalam tabel 1.3. Hasil pemeriksaan keuangan daerah semakin memburuk setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari tahun 2007-2011 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin meningkat, wajar dengan pengecualian (WDP) tidak memiliki banyak perubahan, opini tidak wajar (TW), bahkan tidak memberikan pendapat (TMP) menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada table 1.3.

Tabel 1.3 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 - 2011

LKPD (tahun)	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121*	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	2%	96	18%	520

*Pemeriksaan 2 LKPD Tahun 2010 yaitu LKPD Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mamberamo Tengah dilakukan pada Semester II Tahun 2012
(Sumber : www.bpk.go.id – IHPS II Tahun 2012)

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2007, dinyatakan bahwa terhadap 469 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 4 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 283 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 59 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 123 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menunjukkan peningkatan kompetensi yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2007, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya kepada 4 entitas, tahun 2008 sebanyak 13 entitas, dan tahun 2009 sebanyak 15 entitas. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan proporsi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kompetensi dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi informasi laporan keuangan, yaitu: Indriasari dan Nahartyo (2008); Sukmaningrum (2012) bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Masih sedikitnya penelitian tersebut dan perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan, ada penambahan satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pemilihan SKPD Kota Depok sebagai objek penelitian karena provinsi Jawa Barat dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, ditahun yang sama pula di daerah Jawa Barat, hanya Kota Depok dan Kota Banjar yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Predikat WTP ini bisa diartikan bahwa pemerintah sudah menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar sesuai aturan sebagai perwujudan dari komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan (*good governance*). Ini wujud nyata *political will* pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

(<http://economy.okezone.com/read/2013/05/28/320/814042/depok-dan-banjar-dapat-opini-wtp-dari-bpk>)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dilakukan pada salah satu kota di daerah Jawa Barat tersebut, sehingga penelitian ini diberi judul: **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)”**

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Akuntabilitas dinilai sangat penting dalam mewujudkan *good government*. Hal itu dilakukan melalui laporan keuangan yang telah diaudit secara profesional. Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap *good governance* dalam hubungan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik, adalah korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal yang melekat. Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu melekat di dalam birokrasi pemerintah yang justru ditandai oleh kelangkaan sumber daya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah penerapan SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Menganalisis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Menganalisis pengaruh penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

I.3.2 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. **Bagi Praktisi**

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.

2. **Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

I.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.

BAB 2

TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: (i) teori implementasi kebijakan yang menjadi landasan teori penelitian ini dan konsep-konsep mengenai akuntabilitas keuangan meliputi definisi, penyebab, dan akibat yang ditimbulkan, (ii) uraian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (iii) pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian penelitian terdahulu yang dirangkai dengan kerangka pemikiran.

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Agency Theory

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas public sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari

oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (faristina, 2011).

2.1.2. Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut, mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan

mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/ bupati/ walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
3. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2.1.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Dunnetts dalam anonim, *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2004) dalam anonim, *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

2.1.5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Menurut Abdul Halim (2008:35) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Berbeda dengan Abdul Halim, menurut Dedi Nordiawan (2006:35) akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian,

penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Menurut Rondinelli dalam Cheema dan Rondinelli (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Bastian : 2006).

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen – dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah :

- a. Neraca
- b. Laporan Realisasi Anggaran dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.6. Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (<http://www.informatika.lipi.go.id/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia>).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa

mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

2.1.7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Seperti telah diuraikan dalam pendahuluan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengendalian intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2. Pengendalian administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Wilkinson *et al.*, (2000) menyebutkan subkomponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2003): (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang terfokus pada sektor publik diantaranya Indriasari dan Nahartyo (2008), Roviyantie (2011), Arifianti (2011), Zuliarti (2012).

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menunjukkan hubungan nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi. Kesimpulannya adalah bahwa

pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif.

Hal ini didukung penelitian Zuliarti (2012) yang mengatakan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Namun demikian terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian.

Penelitian Roviyantie (2011) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap informasi pelaporan keuangan. Sejalan dengan Roviyantie (2011), penelitian Tantri (2012) juga mengatakan terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan.

Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Indriasari dan Nahartyo (2008)	Nilai informasi pelaporan keuangan pmda sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi kapasitas SDM berpengaruh negatif.
2.	Choirunisah (2008)	Kualitas informasi laporan keuangan SAI, kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, sistem	Sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan

		pengendalian	kerja
3.	Roviyantie (2011)	Kualitas laporan keuangan, sumber daya manusia, dan system akuntansi keuangan	Sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
4.	Arifianti (2011)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan	Sumber daya manusia, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah), teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
5.	Sukmaningrum (2012)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal	Sumber daya manusia, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah), dan faktor eksternal berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
6.	Zuliarti (2012)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi	Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah) dan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

Sumber : Berbagai jurnal ilmiah, 2013

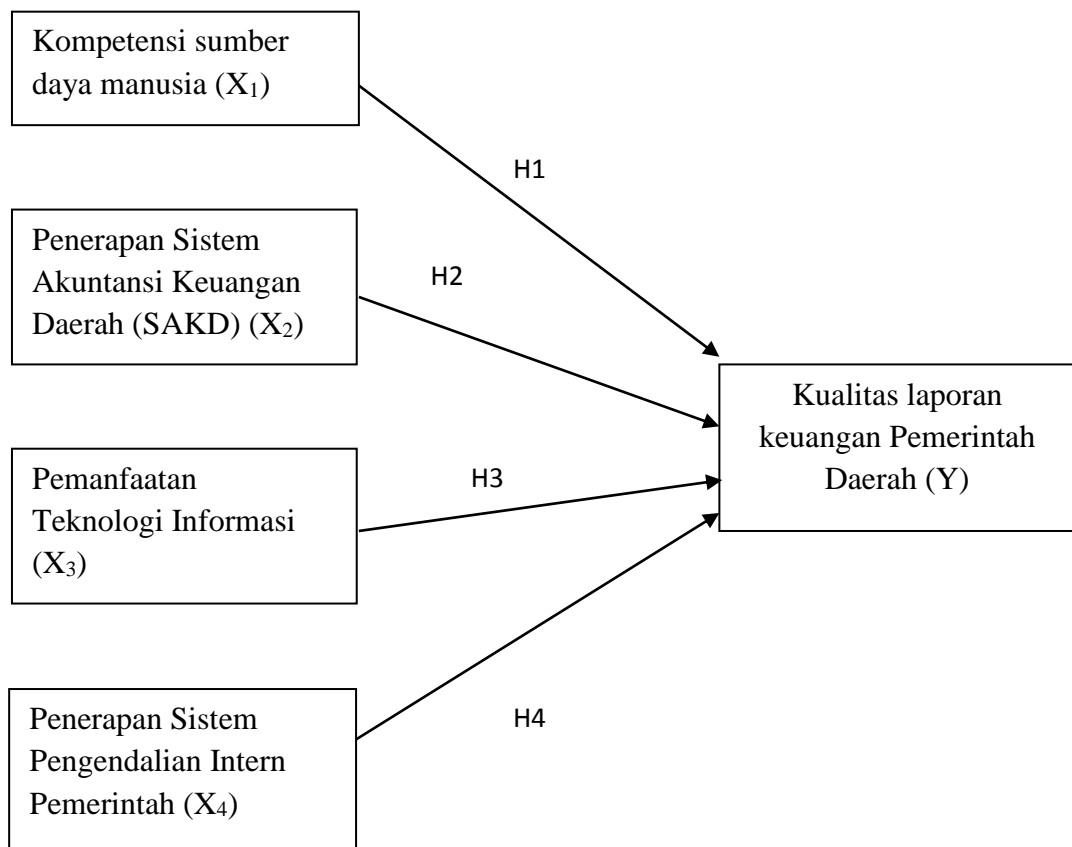
2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD), dan sistem pengendalian intern.

Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Begitu juga dengan penelitian Tantri (2012) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di

instansi pemerintahan Kabupaten dan Kota Semarang belum berkompetensi, hal ini terbukti tidak ada satu pun laporan keuangan yang diterima Badan Pemeriksa Keuangan dengan predikat baik (Koran Tempo edisi 16 Januari 2009).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roviyantje (2011) yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kompetensi informasi laporan keuangan.

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.4.2. Hubungan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17) adalah sebagai berikut. :

a. Tertib

Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Taat pada peraturan perundang-undangan

Taat adalah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Efektif

Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

d. Efisien

Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

e. Ekonomis

Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

f. Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

g. Bertanggung jawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

h. Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

i. Kepatutan

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

j. Manfaat untuk masyarakat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan

keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

H₂ : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3. Hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Hal ini dialami oleh pemerintah daerah di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dalam gala *dinner* bersama Guru Besar Pemasaran, Philip Kotler di Jakarta. Beliau mengakui bahwa bangsa Indonesia masih belum mampu menggunakan secara maksimal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), walaupun teknologi tersebut telah tersedia (ANTARA News, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.4.4. Hubungan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada suatu nilai (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, digunakan dua macam variabel penelitian.

1. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2002), laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

Jumlah item pertanyaan adalah 8 item dengan skala Likert 1-5. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan indikator yaitu :

1. Aktivitas keuangan di masa lalu
2. Memprediksi masa yang akan datang

3. Ketepatanwaktuan penyajian
4. Pengambilan keputusan
5. Disajikan wajar dan jujur
6. Informasi dapat dibandingkan
7. Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami
8. Sesuai SAP

2. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2003). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

1. Kompetensi Sumber daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi menurut *Guy et al.* (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Item-item disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah. Jumlah item pertanyaan adalah 7 item dengan skala Likert 1-5. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Xu, *et al.* (2003) yaitu :

1. Pemahaman tentang akuntansi
2. SDM yang berkualitas
3. Sumber daya yang memadai
4. Peran dan tanggung jawab
5. Pelatihan keahlian dalam tugas
6. Sosialisasi peraturan baru
7. Pemahaman tentang struktur organisasi

2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1), Sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jumlah item pertanyaan adalah 8 item dengan skala Likert 1-5. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan diukur dengan indikator yaitu :

1. Kesesuaian sistem dengan SAP
2. Pengidentifikasian transaksi
3. Pencatatan transaksi
4. Bukti disetiap transaksi
5. Pencatatan kronologis
6. Pengklasifikasian transaksi
7. Laporan keuangan setiap periode
8. Pelaporan yang konsisten dan periodic

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.* , 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

Jumlah item pertanyaan adalah 6 item dengan skala Likert 1-5. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator yaitu :

1. Sistem akuntansi sesuai SAP
2. Jaringan internet
3. Jaringan internet termanfaatkan dengan baik

4. Aplikasi yang digunakan
5. Laporan keuangan terkomputerisasi
6. Software sesuai dengan UU

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Jumlah item pertanyaan adalah 5 item dengan skala Likert 1-5.

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan indikator yaitu :

1. *Standard Operating Procedure* (SOP)
2. Implementasi PP No 60
3. Dokumen dan catatan yang memadai
4. Pemisahan wewenang
5. Tindakan disiplin atas pelanggaran

Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap

pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Data yang diperoleh dari skala Likert adalah berupa data interval, karena skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju.

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok. Jumlah SKPD di Kota Depok sebanyak 37 SKPD yang terdiri dari 15 dinas, 5 badan, 2 kantor, 1 sekretariat, RSUD, Inspektorat, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, dan 11 kecamatan. Pemilihan ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Depok karena pada tahun 2012 provinsi Jawa Barat dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan capaian tertinggi dalam akuntansi

dan pelaporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, ditahun yang sama pula di daerah Jawa Barat, hanya Kota Depok dan Banjar yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu kota di Jawa Barat tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing Dinas pada SKPD,
2. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti (Supranto, 2000). Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada SKPD tersebut. Kuesioner yang dibuat dalam bentuk dengan menggunakan skala Likert.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Uji Kompetensi Data

1. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat hingga sejauh mana ketepatan dan ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur gejala (Sastradipoera, 2005). Validitas dapat diartikan pula sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid dan sahih mempunyai validitas yang tinggi, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner

dengan skor totalnya. Umar (2002) korelasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment Pearson, sebagai berikut :

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi *product moment*

N = jumlah responden

X = skor untuk masing-masing item pernyataan

Y = jumlah skor keseluruhan dari seluruh item pernyataan untuk masing-masing responden.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian berperilaku mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah (Harrison, dalam Zulganef, 2006). Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal apabila jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik *CronbachAlpha*, yang dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut (Umar, 2002) :

$$r_{ii} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right)$$

Keterangan :

r = reliabilitas instrumen

k = banyak butir pertanyaan

$\Sigma \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

Dalam Ghozali (2007), instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila jika nilai koefisien *CronbachAlpha* yang diperoleh $> 0,60$.

3.5.2. Analisis Statistik Deskriptif

Model yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan cara mendeskripsikan data sampel yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari *earnings management*.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2005).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2005).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Apabila residual plot yang terjadi tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada diatas serta dibawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak ada masalah heteroskedastisitas. Cara lainnya yaitu dengan metode Glejser dengan cara meregres nilai absolute residualnya terhadap variabel *independent*, apabila

variabel *independent* signifikan secara statistik mempengaruhi variabel *dependent*, maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05). Jika dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.5.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = kualitas laporan keuangan

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi sumber daya

β_2 = koefisien regresi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

β_3 = koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi

β_4 = koefisien regresi sistem pengendalian intern

X_1 = variabel sumber daya

X_2 = variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

X_3 = variabel pemanfaatan teknologi informasi

X_4 = variabel sistem pengendalian intern

variabel e = variabel pengganggu

3.5.5. Uji *Goodness of Fit*

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur *Goodness of fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik t. perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006).

3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2007). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R^2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel *independent* dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel *dependent*.

1.5.5.2. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan 5%, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bila *probability t* hitung $> 0,05$ H_0 diterima dan H_1 ditolak.
2. Bila *probability t* hitung $< 0,05$ H_0 ditolak dan H_1 diterima.